

Disdik Anggarkan Rp 3 M untuk Komputer

Khusus SMPN 4 Kintamani akan menerima 2 paket karena jumlah siswa kelas IX lebih dari 200 orang.

BANGLI, NusaBali

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bangli siapkan anggaran Rp 3.010.000.000 untuk pengadaan komputer dan server. Bantuan komputer dan server tersebut akan digelontorkan ke sejumlah

sekolah untuk menunjang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ajaran 2018/2019.

Kepala Disdikpora Bangli, I Nyoman Suteja mengatakan, pengadaan komputer dan server bersumber dari dana APBD. Pengadaan komputer meliputi 10 paket dengan rincian satu paket sebanyak 18 unit komputer ditambah 1 server. "Batuan perangkat komputer dan server menyasar 10 SMP," ungkap Suteja didampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Bangli, I Nengah Danta Haryana, Kamis (18/1).

SMP yang nantinya menerima bantuan komputer dan server yakni SMPN 4 Bangli, SMPN 5 Bangli, SMPN 2 Susut, SMPN 3 Kintamani, SMPN 4 Kintamani, SMPN 5 Kintamani, SMPN 6 Kintamani, SMPN 7 Kintamani, dan SMP Satu Atap (Satap) 1 di Desa Siakin, Kecamatan Kintamani. Khusus SMPN 4 Kintamani akan menerima bantuan sebanyak 2 paket. Pertimbangannya, jumlah siswa kelas IX di SMPN 4 Kintamani lebih dari 200 orang.

Dikatakan, dengan adanya bantuan komputer tersebut, jumlah SMP di Bangli yang

melaksanakan UNBK bertambah. Berdasarkan hasil koordinasi dengan 29 Kepala 29 SMP di Bangli, sebanyak 21 sekolah menyatakan kesiapannya melaksanakan UNBK. Terjadi peningkatan signifikan dibanding tahun ajaran 2016/2017 yang diikuti 2 SMP yakni SMP 1 Bangli dan SMPN 3 Bangli. Dengan 21 SMP siap UNBK prosentase partisipasi mencapai 72,42 persen.

Suteja menjelaskan, pada tahun 2018 juga diplot anggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 7,1 miliar lebih untuk kegiatan fisik dan pengadaan alat peraga, peralatan

laboratorium, media pembelajaran untuk SD dan SMP. Kegiatan SD meliputi pembangunan ruang kelas belajar sebanyak 7 paket, rehab ruang kelas sebanyak 3 paket, dan pengadaan koleksi perpustakaan untuk 17 sekolah. "Kegiatan pengadaan untuk SD diplot anggaran Rp 5.170.879.000," terang Suteja. Kegiatan SMP meliputi rehab ruang belajar sebanyak 7 paket, pembangunan 1 unit laboratorium, pengadaan media pembelajaran 3 paket, pengadaan peralatan dan alat peraga laboratorium sebanyak 3 paket serta sarana Pelatihan Pengelolaan Dewan Kerja (PPDK) untuk 4 paket kegiatan. e

June 15 1904

Pelaporan Penggunaan Bansos Molor

Hingga 17 Januari 2018, penerima hibah bansos yang sudah menyetor LPJ baru 166, dari 401 penerima.

SEMARAPURA, NusaBali

Kelompok warga penerima dana bantuan sosial (bansos) hibah penunjang urusan kebudayaan di Klungkung, terkendala dalam merealisasikan dana itu menjadi kegiatan. Kendala itu, di antaranya, waktu pencairan dana bansos cukup mepet den-

gan akhir tahun 2017. Akibatnya, pihak penerima hibah terlambat menyetor laporan pertanggungjawaban (LPT), paling lambat 10 Januari 2018.

Setelah direkap penyampaian SPJ tersebut hingga 17 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, kelompok warga penerima hibah bansos yang sudah menyetor LPJ baru 166, dari 401 penerima hibah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung I Gusti Ngurah Putra saat dikonfirmasi, membenarkan hal tersebut. Penerima bansos hibah sudah menyetor LPT, 166 kelompok, sisanya masih dalam proses.

Disebutkan, pelaporan itu

memang harus selesai 10 Januari 2018. Namun karena pencarian hibah baru bisa dilakukan pada Desember 2017, tentu ini juga menjadi permakluman. "Kami akan lihat perkembangannya," ujarnya kepada NusaBali, didampingi Kasubag Keuangan BPKPD Klungkung, Santosa, Minggu (21/1).

Mepetnya pencarian dana hibah tersebut, maka hibah yang pembangunan dananya skala besar bernilai Rp 200 juta - Rp 300 juta akan diajukan ulang pada anggaran berikutnya. Pemkab Klungkung maupun pihak berwenang pun sudah turun ke masing-masing kecamatan bagi penerima hibah. Untuk memberikan so-

sialisasi tentang penggunaan hibah ini dengan baik dan benar.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Klungkung I Nyoman Mudarta mengatakan, pihaknya akan menggelar monitoring dan evaluasi (monev) ke lapangan. Untuk mengecek sejauh mana pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD Perubahan 2017. "Berdasarkan monev itulah kami akan membuat laporan kepada bupati dan inspektorat," ujarnya.

Dari monev itu, lanjut dia, bisa diambil langkah apa yang dilakukan berikutnya jika memang ada pembangunan yang tidak dilaksanakan atau masalah

lainnya. "Mudah-mudahan saja permasalahannya tidak sampai ke ranah hukum," harap Mudarta.

Sebelumnya, penerima hibah di Kecamatan Klungkung mendapat sosialisasi dalam rangka mempelancar proses pencairan hibah perubahan tahun 2017 agar tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah. Dalam sosialisasi tersebut langsung hadir Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Nyoman Mudarta, Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Klungkung serta Instansi terkait bertempat di Ruang Rapat Kantor Camat Klungkung, Rabu (8/11/2017). **wan**

Bantuan 2.000 Bedah Rumah di 6 Kabupaten Badung Anggarkan Rp 50 Juta Per Rumah

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung mengalokasikan dana sekitar Rp 100 miliar di 2018 untuk program bedah rumah di enam kabupaten se-Bali. Seperti ditegaskan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, pemkab akan membantu sebanyak 2.000 unit.

Enam kabupaten yang disasar adalah penerima bantuan penyesuaian pajak hotel dan restoran (PHR) seperti Kabupaten Bangli, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Jembarana, dan Buleleng.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Badung I Made Wira Darmajaya, menyatakan untuk merealisasikan program bedah rumah tersebut alokasi anggaran sudah disiapkan. Kini tinggal menunggu tindak lanjut dari kabupaten penerima saja, karena anggaran baru bisa cair setelah ada pengajuan proposal.

"Kalau kami dari penganggaran sudah ada, namun realisasinya menunggu masing-masing kabupaten penerima. Untuk masalah itu kami tidak bisa intervensi," ungkap Wira Darmajaya, Senin (22/1), di kantor Bappeda, Puspem Badung di Sempidi, Kecamatan Mengwi.

Baru nanti setelah ada pengajuan ke Bupati Badung, selanjutnya dana akan langsung ditransfer ke daerah penerima. "Yang jelas me-

kanismenya sudah ada, jatah masih-masing daerah sudah diberikan. Sekarang tunggu tindak lanjut dari masing-masing kabupaten," tegas mantan Sekwan Badung itu.

Sayangnya disinggung nominal anggaran bantuan bedah rumah untuk enam kabupaten tersebut, pejabat asal Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, itu mengaku tak hafal persis. Menurut dia secara teknis langsung di bawah leading sector Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung.

Sementara Kepala BPKAD Badung Ketut Gede Suyasa, menjelaskan nominal masing-masing penerima bantuan bedah rumah senilai Rp 50 juta. Perhitungan sederhana bila satu rumah seharga Rp 50 juta, jadi total pemkab menyiapkan sedikitnya Rp 100 miliar untuk merealisasikan program ini.

"Masing-masing sudah ada jatahnya, Kabupaten Karangasem sebanyak 450 unit, Buleleng ada 450 unit, Klungkung ada 250 unit, Bangli ada 250 unit, Tabanan juga 300 unit, dan Jembrana total ada 300 unit," ungkapnya.

Untuk diketahui, di Badung program bedah rumah sudah bergulir sejak tahun 2016. Tahun pertama program digulirkan total ada 625 rumah tangga sasaran (RTS) menerima bantuan. Sedangkan pada 2017 total ada 150 RTS yang menerima bantuan. **asa**

Edisi : Senin, 23 Januari 2018

Hal :